

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan Inflasi Kota Sister City

- Kabupaten Kebumen bukan kota IHK sehingga BPS tidak menghitung inflasi Kabupaten. Angka Inflasi di Kabupaten Kebumen mengacu pada sister city Kota IHK terdekat yaitu Cilacap.
- Pada triwulan satu tahun 2024 Tingkat inflasi month to month (m-to-m) sister city 0,08 persen, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Bulan Maret sebesar 0,65 (m-to-m).
- Kelompok makanan dan minuman menyumbang deflasi sebesar 0,12 persen dengan komoditas penyumbang inflasi beras 0,28%, telur ayam ras 0,12%, cabai merah 0,09%, cabai rawit 0,09% dan pepaya 0,01%. Sementara komoditas yang memberikan sumbangan inflasi yaitu : bawang merah 0,14%, daging ayam ras 0,05%, bawang putih 0,04%, buah naga 0,02% dan minyak goreng 0,02%

2. Perkembangan Harga di Kabupaten Kebumen

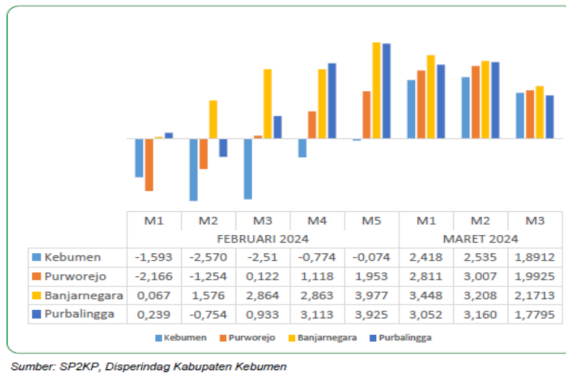
- Harga **Daging Ayam Ras dan Bawang Merah naik** pada pertengahan minggu ketiga Maret 2024 dengan selisih harga tertinggi terhadap harga terendah sebesar **Rp500 dan Rp1.000**. Harga **Cabai Merah dan Cabai Rawit turun** di awal minggu dengan selisih harga tertinggi terhadap harga terendah sebesar **Rp8.000 dan Rp6.000**. Sementara itu untuk harga komoditas lain relatif stabil.

3. Persentase Perubahan Harga Mingguan Februari – Maret

- Pada Minggu ketiga Maret 2024 jika dibandingkan dengan Minggu kedua Maret, Harga beras, cabai merah dan cabai rawit turun sebesar 5,63%, 26,13% dan 20%. Sedangkan daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, minyak goreng dan gula pasir naik 6,43%, 4,75%, 12,50%, 4,75%

4. Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kab. Kebumen dan Kab. Sekitar

- IPH Kabupaten Kebumen pada Minggu ketiga Maret 2024 tercatat sebesar 1,8912% dengan komoditas yang memberi andil tertinggi perubahan harga antara lain Daging ayam Ras 1,16%, Beras 0,914% dan Cabai Rawit 0,86%.



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Cabai mempunyai fluktuasi harga yang tinggi, padahal komoditas cabai bisa dihasilkan di Kabupaten Kebumen. Champion cabai di Kebumen dibiayai dari Pusat (APBD Kementerian Pertanian) sehingga hasil panen dari champion cabai dikirim sesuai dengan permintaan pusat, dan sebagian cabai yang ada di Pasar berasal dari luar kota Kebumen
2. Pemkab Kebumen perlu menjaga stabilitas harga cabai baik dari sisi produsen agar ketika harga rendah petani tidak merugi, dan menjaga stabilitas harga cabai di level konsumen agar harga terjangkau oleh konsumen dan tidak menimbulkan inflasi.
3. Belum tersedianya alokasi anggaran dari APBD Kabupaten untuk pengendalian harga cabai di level produsen baik berupa subsidi harga maupun fasilitas distribusi. Anggaran pengendalian harga di level produsen baru tersedia untuk komoditas padi melalui dana talangan.
4. Untuk menjaga stabilisasi harga di level konsumen sudah dialokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp.200.000.000. Sampai akhir triwulan I belum dapat direalisasikan karena masih proses penyusunan Perbup. Dan perlu dipertimbangkan alokasi tambahan anggaran untuk subsidi harga di level konsumen mengingat luasnya Kabupaten Kebumen.
5. Harga ayam ras naik dikarenakan mahalnnya harga jagung (bahan pakan)
6. Stok beras di beberapa TPK dan RPK yang menjual beras SPHP tidak tersedia dikarenakan sistem pembelian beras SPHP di BULOG harus Cash, sedangkan pemilik TPK dan RPK masih memprioritaskan penggunaan dananya untuk stok barang yang lain. Masih ditemukan TPK dan RPK yang menjual beras diatas HET.
7. Pemicu kenaikan harga beras antara lain karena panen di wilayah Kabupaten Kebumen baru sebagian dan harga produksi pertanian / biaya olah lahan meningkat, dan hal ini terjadi di seluruh Indonesia.
8. Belum ada Toko Kendali Inflasi/Kios Kendali Inflasi di Kabupaten Kebumen.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Mengintensifkan kembali gerakan pemanfaatan pekarangan untuk menanam cabai dan sayuran dengan menugaskan Penyuluh di masing masing kecamatan untuk mendampingi
2. Penguatan kembali gerakan menanam melalui Surat Edaran Bupati Nomor 526/9303 tanggal 22 Februari 2024 tentang Gerakan Tanam Cabai dan Sayuran dalam rangka Pengendalian Inflasi di Kabupaten Kebumen.
3. Melakukan kick off gerakan menanam cabai dan sayuran tanggal 29 Februari 2024 dilanjutkan dengan penanaman serentak se Kab. Kebumen.

Mereplikasi konsep agrismart untuk meningkatkan ketahanan pangan di setiap Kecamatan dimulai dari lahan di lingkungan BPP atau Kecamatan, dan mendorong desa untuk mereplikasi di wilayahnya.

5. Masif melakukan Gerakan B2SA, Gerakan Gemar Makan Ikan dan Gerakan Stop Boros Pangan dengan melibatkan PKK tingkat Kabupaten sd Desa, Organisasi Kewanitaan (Persit, Bhayangkari, Muslimat, Aisyiah), Instansi Pemkab dan Instansi Vertikal, Sekolah, Hotel, Restoran dan Kelompok Pengolah Ikan (poklahsar).
 6. Untuk menjaga stabilitas harga cabai di level produsen, berkoordinasi dengan Dishanpan Prov Jateng dan BAPANAS menggunakan Fasilitas.
 7. Pelaksanaan stabilisasi harga di level konsumen dengan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sampai di tingkat desa, penyaluran SPHP baik melalui GPM maupun TPK.
 8. Disperindag bersama BULOG melakukan sosialisasi ke pedagang beras di 23 Pasar Tradisional (26 Kecamatan) untuk mendaftar sebagai TPK BULOG agar dapat menjual beras SPHP setiap saat.
 9. Penggunaan 20% dana desa untuk ketahanan pangan dimulai dari Penerbitan Perbup no 10 tahun 2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 dan pendampingan ke desa terkait prioritas penggunaannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa.
 10. Pengembangan demplot dan demfam untuk komoditas yang menyumbang inflasi (bawang merah, cabai, sayur, jagung, kedelai dan padi)
 11. Program Corporate Farming : pertanian yang dikelola dengan manajemen pertanian yang mengintegrasikan hulu hilir (hulu dengan pengelolaan berbasis manajemen pertanian dan hilir dengan penyediaan off taker). prioritas program corporate farming untuk komoditas padi, jagung dan kedelai. Tahun 2024 di 13 poktan di 8 Kecamatan dengan luasan 83 Ha, dari yang sebelumnya 7 poktan di 6 kecamatan. peningkatan produksi padi yang dihasilkan dari pengelolaan pertanian dengan manajemen corporate farming kurang lebih 8-9 ton/ha.
 12. Mengoptimalkan peran BUMD Pangan dalam pengendalian inflasi : sebagai pelaksanan GPM, Off taker hasil panen petani, Kerjasama Antar Daerah secara B to B
 13. Perencanaan Kios Kendali Inflasi/Toko Kendali Inflasi di Pasar Tumenggungan (pasar pantauan SP2KP).
 14. Hilirisasi produk pertanian dan pemasaran online produk pertanian menggunakan simbok blonjo, dan pasar id.
 15. Melaksanakan monev harga dan stok kebutuhan pokok secara rutin dan melaksanakan sidak ke pedagang besar agar tidak menahan harga dan tidak menaikkan harga.
 16. Evaluasi atas sytem informasi pangan (sitampan) dan early warning system aplikasi Sistem Informasi Kebutuhan Pokok Masyarakat (Simbok).
 17. Mendorong peternak ayam ras untuk dapat mengakses jagung secara bersama sama agar mendapatkan harga yang lebih murah.
 18. Penyusunan Perda Cadangan Pangan Daerah.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
1. Gerakan menanam pekarangan dengan komoditas penyumbang inflasi dilaksanakan dan berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK Kebumen. Bahkan di beberapa lokasi perkantoran Balai Penyuluh Pertanian (BPP Pejagoan, BPP Sruweng, BPP Rowokele) telah melakukan replikasi Program Agrismart yang telah ada di Halaman Belakang Pendopo Kabumian.
 2. Gerakan B2SA, Gerakan Stop Boros Pangan dan Gerakan Gemar Makan Ikan sudah aktif dilakukan dengan melibatkan stakeholder terkait.
 - 4.

Stabilisasi Harga di Level produsen untuk komoditas padi dengan sumber dana talangan

3. belum dapat dilaksanakan pada triwulan I, direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan II.
4. Stabilisasi harga di level konsumen dengan Program Subsidi Harga Pangan Strategis di Tingkat Konsumen belum dapat direalisasikan pada Triwulan I dikarenakan masih dalam proses penyusunan dasar hukum.
5. Gerakan Pangan Murah (GPM) melibatkan BUMD PT. Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda), BULOG, RNI, KWT, Poktan/Gapoktan. Sampai dengan triwulan I telah terlaksana Pembuatan kawasan pertanian komoditas penyumbang inflasi di 57 lokasi
6. Program corporate farming padi dengan off taker BUMD Aneka Usaha sudah dilaksanakan dan hasil Off taker digunakan untuk mensuplay Food Station DKI dan rencananya akan digunakan untuk pelaksanaan subsidi harga pangan strategis untuk komoditas beras.
7. Kendala permodalan dalam pengelolaan corporate farming
8. KAD dengan Food Station DKI dalam Proses PKS (beras), dan dalam proses penjajagan kerjasama dengan PT. Berdikari (daging ayam ras), PT. Semar Sakti Brebes (jagung) dan PT. Seger Agroberidkari (Jagung)
9. Penggunaan 20% dana desa untuk ketahanan pangan sudah dilakukan pendampingan tetapi dalam pengalokasiannya terkendala karena tidak semua program/kegiatan terakomodir di Siskeudes (penatusahaan keuangan desa) jadi Pemdes cenderung mengalokasikan kegiatan yang terakomodir di Siskeudes.
10. Monev harga kepokmas di 23 Pasar dilakukan setiap hari, monev TPK BULOG yang ada di Pasar. Masih ditemukan TPK BULOG yang menjual beras SPHP diatas HET dan sudah dikoordinasikan ke BULOG untuk dilakukan pembinaan.
11. Penjualan melalui SIMBOK BLONJO dan Pasar. Id belum optimal dalam pelaksanaanya masih terdapat kendala tekhnis baik dari sisi pengelolaan aplikasi maupun dari kesiapan supply produk.
12. Penyusunan Perda Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan di masa sidang I

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Perlu ditumbuhkan petani champion untuk komoditas penyumbang inflasi
2. Pengalokasian APBD Kabupaten untuk susbidi harga di level produsen ataupun fasilitas distribusi untuk petani
3. Anggaran Subsidi Harga Pangan Strategis perlu dipertimbangkan untuk diberikan tambahan alokasi anggaran APBD Perubahan mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kebumen dan pengalaman tahun 2023 Menjelang Nataru Kebumen mengalami kenaikan IPH yang cukup tinggi.
4. Alternatif pendanaan Corporate Farming melibatkan perbankan dengan skema kredit musiman dan dipermudah dengan tanpa agunan.
5. Optimalisasi pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk menyerap gabah petani dan penerbitan resi dapat digunakan untuk permodalan petani.
6. Penyusunan Neraca Pangan Daerah untuk dilakukan secara rinci agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang menyebabkan kekurangan pasokan.
7. Penyusunan Peta Kerawanan Pangan untuk dapat segera dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kegagalan panen dan anomali cuaca
8. Mengoptimalkan lumbung pangan desa dan melakukan pengisian lumbung pangan desa menggunakan dana desa
9. Menyusun prioritas penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dan berkoordinasi dengan kementerian desa/provinsi terkait siskeudes

BUMD Aneka Usaha untuk menjadi off taker komoditas pertanian dan menjalin KAD B to

10.

B baik untuk komoditas pertanian maupun non